



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

Inspektorat Sidoarjo
Where the accountability began 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

Inspektorat Sidoarjo
Where the accountability began 

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi ekonomisnya.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, kedepannya laporan kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun karyawan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sidoarjo, 4 Februari 2022

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19700926 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
IKHTISAR EKSEKUTIF	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
a) Dasar Hukum	1
b) Tujuan Penyusunan	1
1.2. Gambaran Umum OPD	1
a) Struktur Organisasi	1
b) Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Aspek Strategis OPD	7
a) Sumber Daya Aparatur	7
b) Aset Yang Dimiliki	9
c) Isu Strategis Yang Dihadapi	10
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Perencanaan Strategis	11
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	13
2.3. Perjanjian Kinerja	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	16
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	16
a. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah	16

b.	Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah	17
i.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target	17
ii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	18
iii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah	19
iv.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart nasional (jika ada)	20
v.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis	20
vi.	Evaluasi dan analisis kinerja	20
-	Analisis keberhasilan dan kegagalan	20
c.	Pengukuran Kinerja Tahunan	21
d.	Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan	22
i.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target	22
ii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	25
iii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah	27
iv.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart nasional (jika ada)	28
v.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis	28
vi.	Evaluasi dan analisis kinerja	29
-	Analisis keberhasilan dan kegagalan	29

3.3. Analisis Pencapaian Program Pendukung	29
3.4. Laporan Realisasi Anggaran	30
3.5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	31
3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
a. Efektivitas dan Efisiensi	31
b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	32
BAB IV : PENUTUP / SIMPULAN UMUM	33

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Bagan struktur Organisasi 2

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Proporsi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	8
2. Tabel 1.2 Proporsi Pegawai berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan ...	8
3. Tabel 1.3 Proporsi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	8
4. Tabel 1.4 Proporsi pegawai berdasarkan rincian jabatan	8
5. Tabel 1.5 Aset Inspektorat Daerah per 31 Desember 2021	9
6. Tabel 2.1 Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD	11
7. Tabel 2.2 Matrik Reviu Renstra 2021	12
8. Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2021	13
9. Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Tahun 2021	14
10. Tabel 2.5 Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Tahun 2021	15
11. Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021	16
12. Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2021	16
13. Tabel 3.3 Perbandingan capaian kinerja dengan target Tujuan Tahun 2021.....	17
14. Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 3 Tahun Terakhir	18
15. Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dengan Target Jangka Menengah	19
16. Tabel 3.6 Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart Nasional	20
17. Tabel 3.7 Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi Sejenis	20
18. Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Tujuan	21

19. Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021	21
20. Tabel 3.10	Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan target	
	Sasaran	22
21. Tabel 3.11	Perbandingan realisasi kinerja sasaran 3 tahun terakhir...	25
22. Tabel 3.12	Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan target jangka	
	Menengah	27
23. Tabel 3.13	Perbandingan antara capaian kinerja sasaran dengan standart	
	Nasional	28
24. Tabel 3.14	Perbandingan antara capaian kinerja sasaran dengan instansi	
	Sejenis	28
25. Tabel 3.15	Analisis Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja	
	Sasaran	29
26. Tabel 3.16	Capaian kinerja Program Tahun 2021	29
27. Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Tahun 2021	30
28. Tabel 3.18	Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	31
29. Tabel 3.19	Efektivitas dan Efisiensi Kinerja dan Anggaran	
	Tahun 2021	31

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik 3.1 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Tujuan Tahun 2021	17
2. Grafik 3.2 Perbandingan antara capaian kinerja tujuan dengan target Jangka Menengah	19
3. Grafik 3.3 Perbandingan antara capaian kinerja sasaran dengan target Jangka Menengah	23
4. Grafik 3.4 Perbandingan realisasi kinerja sasaran 3 tahun terakhir	26

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 didapatkan rata-rata capaian kinerja 100,83% dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun rincian capaian kinerja tiap indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

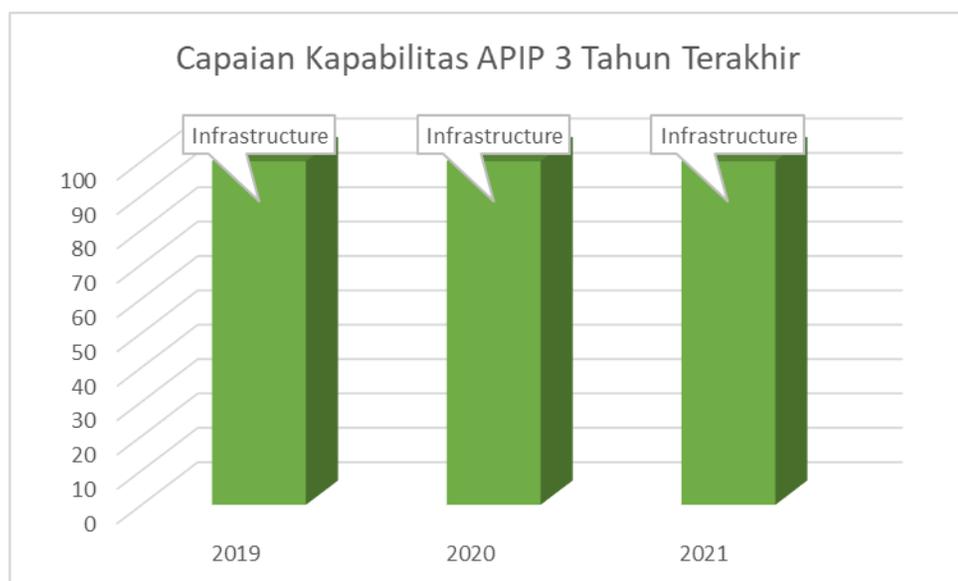
No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	Sangat berhasil
		Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-
		Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	100%	Berhasil
		Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	104,17%	Sangat berhasil
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	113,79%	Sangat berhasil
		Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%	Berhasil

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Penilaian atas penerapan tata kelola APIP mengacu kepada *Internal Audit Capability Model* mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

1. Peran dan Layanan APIP (*Services and Role of Internal Auditing*)
2. Pengelolaan SDM (*People Management*)
3. Praktik Profesional (*Professional Practices*)
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)
5. Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)
6. Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)

Tahun 2021 hasil capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo adalah Level 2 plus (*Infrastructure*) ini mencerminkan bahwa **APIP** kabupaten Sidoarjo sudah mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

Adapun tren capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tabel berikut :



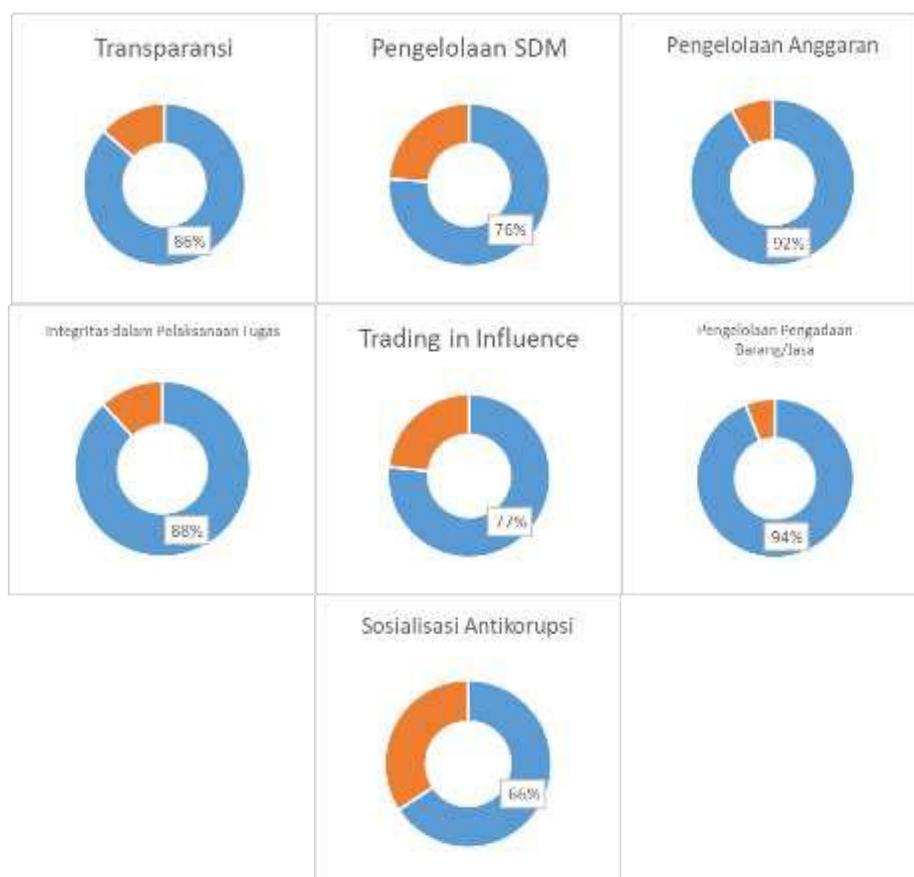
Adapun upaya yang dilakukan agar Kapabilitas APIP optimal, yaitu :

- Memuatkhirkan peta auditan dan menggunakan *risk register* yang disusun OPD sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko (PPBR)
- Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat yang berkaitan pengawasan berbasis risiko

Survey Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dengan tujuan untuk

memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektifitas pencegahan korupsi yang dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Tahun 2021 adalah tahun pertama kabupaten Sidoarjo menjadi obyek survey penilaian integritas yang selanjutnya direncanakan akan dilaksanakan setiap tahun, adapun hasil penilaian Survey Penilaian Integritas Kabupaten Sidoarjo tahun ini adalah 75,49 dari rentang nilai 0 s.d. 100 dengan nilai masing-masing variabel sebagai berikut :



Rata-rata nilai 7 variabel tersebut diatas sebesar 82,71 sedangkan nilai yang diberikan sebesar 75,49 hal ini dikarenakan ada faktor koreksi sebagai berikut :

1. Jumlah pengaduan yang masuk ke KPK dan ditindaklanjuti
2. Jumlah kasus yang masuk ke SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) online yang belum selesai ditindaklanjuti
3. Adanya pengarahan dalam pelaksanaan survey

Adapun upaya yang dilakukan agar capaian Survey Penilaian Integritas optimal, yaitu :

1. Meningkatkan sosialisasi anti korupsi ke seluruh stake holder mulai dari OPD sampai dengan pemerintah desa/kelurahan

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring, upaya

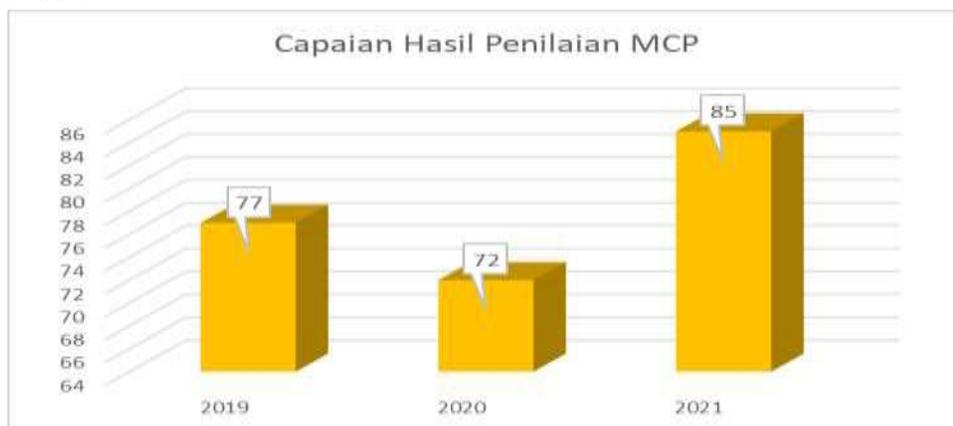
koordinasi, dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.

Tahun 2021 hasil penilaian MCP Kabupaten Sidoarjo adalah 85 dari rentang nilai 0 s.d. 100 dengan nilai masing-masing variabel sebagai berikut :

No.	Variabel	Nilai
1	Perencanaan dan penganggaran	81,1
2	Pengadaan barang dan jasa	84,5
3	Perizinan	100,0
4	Pengawasan APIP	94,4
5	Manajemen ASN	95,1
6	Optimalisasi pajak daerah	97,9
7	Manajemen aset daerah	65,1
8	Tata kelola keuangan desa	92,0

Capaian sebesar 106,25% dari nilai 80 yang ditargetkan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih baik secara administrasi maupun secara regulasi.

Berikut tren hasil penilaian MCP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana grafik di bawah ini :



Adapun upaya yang dilakukan agar capaian MCP optimal, yaitu :

- Asistensi dan monitoring terhadap 8 area intervensi yang difokuskan pada area intervensi yang nilainya rendah yaitu pengelolaan aset daerah melalui :
 - a. Memotivasi sertifikasi atas aset daerah
Memotivasi dan mendorong persetujuan DPRD atas Perda tentang pengelolaan aset daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a) Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

b) Tujuan Penyusunan

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Gambaran Umum OPD

a) Struktur Organisasi

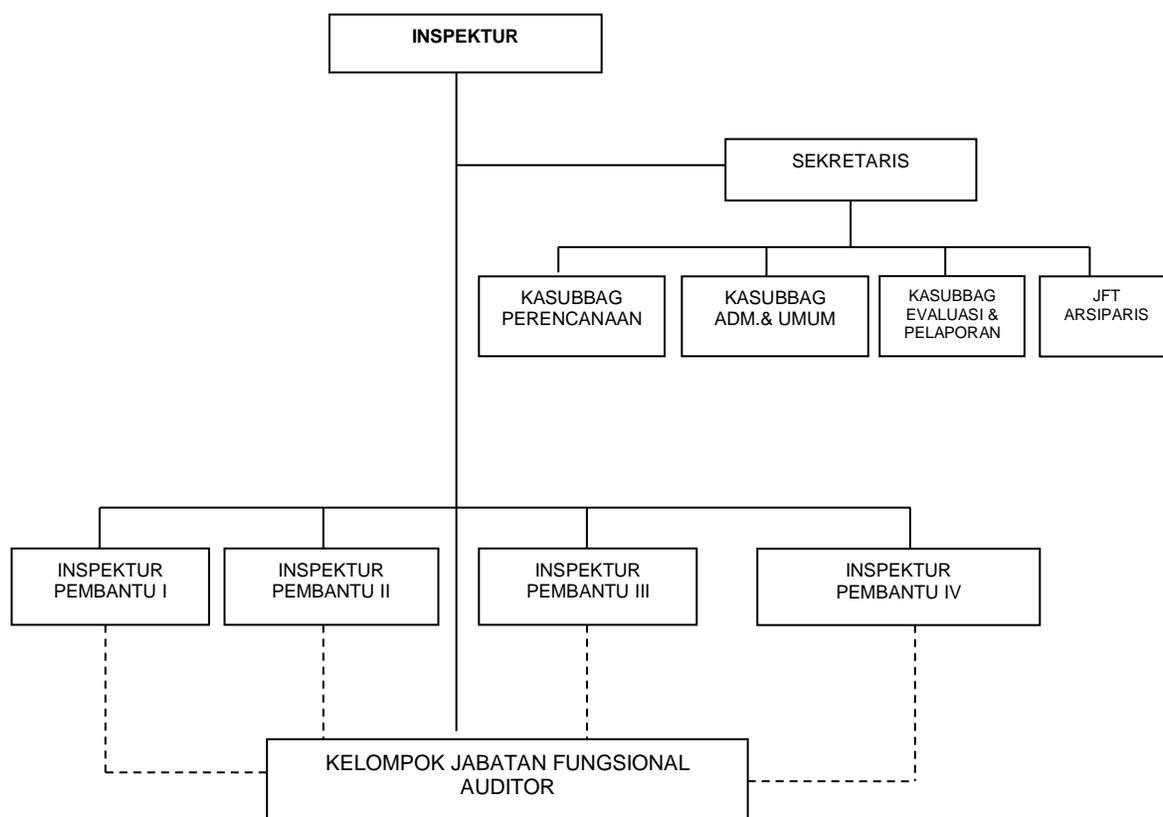
Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam tugasnya bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- 1) Unsur Pimpinan : Inspektur
- 2) Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c) Sub Bagian Administrasi dan Umum
- 3) Unsur Pelaksana : Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 - a) Inspektur Pembantu I
 - b) Inspektur Pembantu II

- c) Inspektur Pembantu III
- d) Inspektur Pembantu IV
- e) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi



b) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas :

“ Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa ”.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan / atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- **Inspektur** mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah.
 - **Sekretariat** yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan serta evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan;
 - b. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan perpustakaan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Pelayanan administrasi;
 - f. Evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugasnya.
 - **Inspektur Pembantu I**

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan dan Desa / Kelurahan :

 - a. Kecamatan Sidoarjo dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Sidoarjo;
 - b. Kecamatan Buduran dan Desa di wilayah Kecamatan Buduran;

- c. Kecamatan Candi dan Desa di wilayah Kecamatan Candi;
- d. Kecamatan Tanggulangin dan Desa di wilayah Kecamatan Tanggulangin;
- e. Kecamatan Porong dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Porong;
- f. Kecamatan Jabon dan Desa di wilayah Kecamatan Jabon;
- g. Kecamatan Krebung dan Desa di wilayah Kecamatan Krebung;
- h. Kecamatan Prambon dan Desa di wilayah Kecamatan Prambon;
- i. Kecamatan Tulangan dan Desa di wilayah Kecamatan Tulangan;
- j. Kecamatan Gedangan dan Desa di wilayah Kecamatan Gedangan;
- k. Kecamatan Sedati dan Desa di wilayah Kecamatan Sedati;
- l. Kecamatan Waru dan Desa di wilayah Kecamatan Waru;
- m. Kecamatan Sukodono dan Desa di wilayah Kecamatan Sukodono;
- n. Kecamatan Taman dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Taman;
- o. Kecamatan Krian dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Krian;
- p. Kecamatan Wonoayu dan Desa di wilayah Kecamatan Wonoayu;
- q. Kecamatan Balongbendo dan Desa di wilayah Kecamatan Balongbendo;
- r. Kecamatan Tarik dan Desa di wilayah Kecamatan Tarik;

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
2. Memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Melakukan pengawasan terhadap dokumen perencanaan dan anggaran;
5. Memberikan jasa konsultasi pengelolaan keuangan;

6. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Daerah;
7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan aset;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

➤ **Inspektur Pembantu II**

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. BUMD;
- g. Kecamatan;

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

1. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
2. Memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah;
4. Melakukan pengawasan terhadap kinerja;
5. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal atas kinerja;
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP;
7. Melakukan pengawasan terhadap laporan kinerja pemda;
8. Melakukan pengawasan pelaksanaan zona integritas;
9. Melakukan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
10. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

➤ **Inspektur Pembantu III**

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntansi dan asset daerah :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. BUMD;

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

1. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
2. Memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Melakukan pengawasan terhadap dokumen perencanaan dan anggaran;
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan infrastruktur;
6. Melakukan pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah;
7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan serapan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah;
8. Melakukan stock opname dan audit operasional/ audit ketaatan;
9. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Daerah;
10. Melakukan konsultasi atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

➤ **Inspektur Pembantu IV**

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap investigasi, pengaduan dan pencegahan korupsi :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. BUMD;
- g. Kecamatan dan desa/kelurahan;

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
2. Memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaporan gratifikasi;
4. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan penanganan kasus/ audit investigasi/ audit PKKN/ audit PKN;
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaporan RAD PPK/ MCP dan LHKASN;
7. Melakukan pengawasan atas terjadinya benturan kepentingan;
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan whistle blowing system;
9. Melakukan pengawasan dalam rangka implementasi perjanjian kerja sama APIP-APH (koordinasi, tukar-menukar informasi serta kegiatan lainnya);
10. Melakukan pengawasan saber pungli
11. Melakukan pengawasan penyalahgunaan wewenang/ korupsi menjadi kinerja investigasi;
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.

1.3 Aspek Strategis OPD

a. Sumber Daya Aparatur

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang yang optimal. Jumlah pegawai di

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 65 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Proporsi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah	Ket.
1.	Pegawai Negeri Sipil	66	
2.	Tenaga Kontrak	1	
Jumlah		67	

Sumber data : Subbag Administrasi dan Umum Desember 2021

Tabel 1.2
Proporsi Pegawai berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan

No	Kepangkatan	Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staf	
1.	Golongan IV	1	5	-	9	-	15
2.	Golongan III	-	-	3	16	9	28
3.	Golongan II	-	-	-	12	11	23
4.	Golongan I	-	-	-	-	-	-
5.	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	1	1
Jumlah		1	5	3	37	21	67

Sumber data: Subbag Administrasi dan Umum Desember 2021

Tabel 1.3
Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan Formal	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S-2)	9
2.	Sarjana (S-1)	29
3.	Sarjana Muda	17
4.	SLTA	10
5.	SLTP	2
JUMLAH		67

Sumber data : Subbag Administrasi dan Umum Desember 2021

Tabel 1.4
Proporsi Pegawai Berdasarkan Rincian Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur	1
2.	Sekretaris	1
3.	Inspektur Pembantu	4
4.	Kepala Sub Bagian	3
5.	Pengadministrasi Umum	2

6.	Pengadministrasi sarana prasarana	1
7.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	1
8.	Pengelola Kepegawaian	1
9.	Pengelola Teknologi Informasi	1
10.	Pengelola Gaji	1
11.	Pengelola Data Evaluasi dan Pelaporan	1
12.	Pengelola Data Tindak Lanjut	1
13.	Pengelola Pengawasan	1
14.	Pengelola Keuangan	2
15.	Bendahara	1
16.	Pengemudi	3
17.	Petugas Keamanan	4
18.	Pramu Bakti	1
19.	Auditor Madya	12
20.	Auditor Muda	13
21.	Auditor Pertama	1
22.	Auditor Pelaksana	6
23.	Audiwan	2
24.	Arsiparis	1
Jumlah		67

Sumber data : Subbag Administrasi dan Umum Desember 2021

b. Aset Yang Dimiliki

Tabel 1.5

Aset Inspektorat Daerah Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Total
1.	Aset lancar	Rp. 22.195.234,00
	Persediaan	Rp. 22.195.234,00
2.	Investasi jangka Panjang	Rp. 0,00
	-	-
3.	Aset Tetap	Rp. 14.084.718.406,45
	Tanah	Rp. 5.472.578.958,00
	Peralatan dan Mesin	Rp. 1.674.684.709,07
	Gedung dan Bangunan	Rp. 6.904.932.895,38
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 18.599.844,00
	Aset tetap lainnya	Rp. 13.922.000,00
4.	Aset lainnya	Rp. 1.411.264,00
	Aset tidak berwujud	Rp. 0,00
	Aset lain-lain	Rp. 1.411.264,00
	TOTAL ASET	Rp. 14.108.324.904,45

Sumber data : Neraca Inspektorat per 31 Desember 2021

c. Isu Strategis Yang Dihadapi

- 1) Pengawasan dengan prokes karena dalam masa pandemic Covid-19;
- 2) Masih adanya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat pada tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan;
- 3) Obrik kurang respon atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menjadi kewajibannya meskipun sudah diberikan peringatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

a. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Perencanaan strategis Inspektorat Daerah memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo	Tujuan RPJMD Kabupaten Sidoarjo	Sasaran RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan Renstra Inspektorat Daerah	Sasaran Renstra Inspektorat Daerah
Misi 1: Pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Sasaran 1: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui optimalisasi pengendalian internal	Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sumber data : Reviu renstra Inspektorat Daerah tahun 2016-2021

b. Matriks Rencana Strategis

- Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui optimalisasi pengendalian internal Indikator Kinerja
- Indikator Kinerja : 1. Nilai SAKIP Kabupaten (target tahun 2021 A)
- Tujuan : 2. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo (target Tahun 2021 Terdefinisi)
3. Opini atas audit BPK (target Tahun 2021 WTP)

Tabel 2.2
Matrik Reviu Renstra 2021

No	Sasaran Strategis		Difinisi Operasional Dan	Tahun	Target Tahunan					Program Pendukung	
	Uraian	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Dasar	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	Jumlah OPD nilai SAKIP minimal B/Jumlah semua OPD x 100%	44,68%	55,31%	63,82%	100%	100%	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
		Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	Jumlah OPD bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara/Jumlah Semua OPD x 100%	0%	2,12%	2,12%	2,04%	0%	0%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
		Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	Tingkat terdefinisi ((3,0≤skor≤4,0)	n/a	n/a	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
		Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	Jumlah Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara/Jumlah Semua Desa x 100%	0,31%	0,31%	0,62%	0,62 %	0%	0%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti/jumlah semua rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal x 100%	98,20%	98,50%	99,00%	94,24%	96%	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti/Jumlah semua rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat x 100%	99,42%	99,50%	99,65%	72,18%	75%	88,76 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti/Jumlah semua pengaduan/kasus yang masuk di Inspektorat x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan

Sumber data : Matriks renstra Inspektorat Daerah tahun 2016-2021

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis		Target	Kegiatan		Target	Anggaran
	Uraian	Indikator Kinerja	2021	Uraian	Indikator Kinerja	2021	
1	2	3	4	8	9	10	11
1	Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang disusun	179 laporan	Rp15.894.038.390
		Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	0%		Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun	35 laporan	
		Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	Terdefinisi		Jumlah kebijakan yang ditetapkan	16 laporan	

	Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	0%		Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang disusun	27	laporan
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	98%		Jumlah laporan hasil monitoring yang disusun	87	laporan
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	78%		Jumlah laporan hasil sosialisasi yang disusun	3	laporan
	Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%		Jumlah laporan hasil penilaian ZI yang disusun	8	laporan
				Jumlah laporan hasil penilaian mandiri SPIP	0	laporan
				Jumlah laporan hasil revidu yang disusun	65	laporan

Sumber data : Rankhir Renja Inspektorat Daerah tahun 2021

2.3. Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2021 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur dengan Bapak Bupati Sidoarjo, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021
1.	Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	a. Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B b. Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan	100% -

	negara	
	c. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	Terdefinisi
	d. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti	78%
	e. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	98%
	f. Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-
	g. Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%

Sumber data : PK Perubahan Inspektur tahun 2021

Tabel 2.5
Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Tahun 2021

No.	Program	Pagu Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15,172,416,465
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	302,182,425
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	419,439,500
	JUMLAH	15,894,038,390

Sumber data : PK Perubahan Inspektur tahun 2021

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 terurai sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
1	Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-
2	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	100% (48 OPD)	100%
3	Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-
4	Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi	100%
5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti	78%	88,76 % (221/249 rekom)	113,79%
6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	98%	100% (958/958 rekom)	102,04%
7	Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%	100% (92/92 kasus)	100%

Sumber data : Laporan Hasil Pengawasan Desember 2021

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah

Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2021	Realisasi di Tahun 2021	Capaian (%)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik melalui	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo	terdefinisi	terdefinisi	100%
		Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo	A	*)	100%

optimalisasi pengendalian internal	Opini atas Audit BPK	WTP	WTP	100%
------------------------------------	----------------------	-----	-----	------

Sumber data : QA BPKP Provinsi Jatim dan LHP BPK tahun 2021 atas LKPD 2020

b. Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

Tabel 3.3

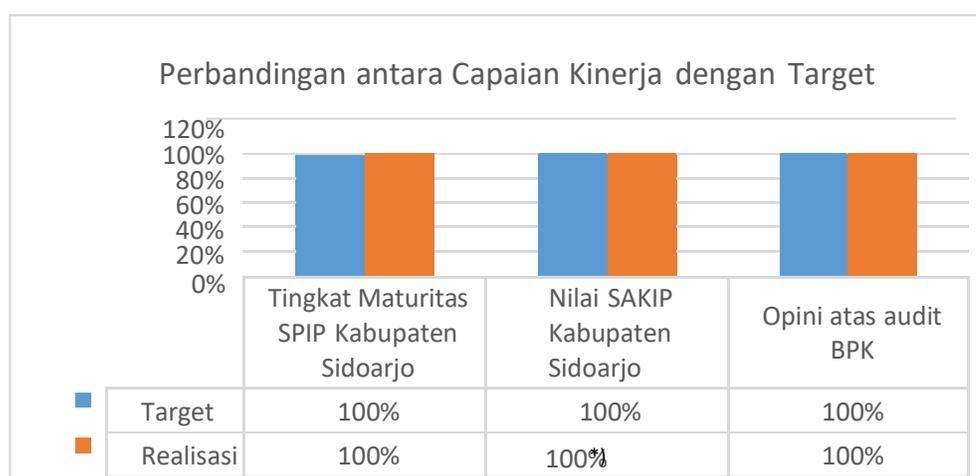
Perbandingan capaian kinerja dengan target Tujuan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target s.d Tahun 2021	Capaian (%)
1	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo	Terdefinisi	terdefinisi	100%
2	Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo	*)	A	100%
3	Opini atas audit BPK	WTP	WTP	100%

Sumber data : QA BPKP Provinsi Jatim dan LHP BPK tahun 2021 atas LKPD 2020

Grafik 3.1

Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Tujuan Tahun 2021



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi untuk 2 (dua) indikator yaitu indikator Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo dan Opini atas Audit BPK telah memenuhi target, satu indikator yaitu Nilai SAKIP Kabupaten sampai sekarang belum rilis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Maturitas SPIP

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi *control design* yang bersifat *hard control* dan *soft control*. Fokus penilaian SPIP ada 5 (lima) unsur yaitu :

1. Unsur Lingkungan Pengendalian
2. Unsur Penilaian Resiko
3. Unsur Aktivitas pengendalian

4. Unsur informasi dan komunikasi
5. Unsur pemantauan pengendalian internal

Berdasarkan *Quality Assurance* (QA) BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : SP-1354/D3/04/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 3,0909 dengan kategori level 3 (terdefinisi). Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan.

Opini Atas Audit BPK

Opini atas audit BPK untuk Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2021 atas Laporan Keuangan Tahun 2020 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Dalam kurun waktu 8 tahun Kabupaten Sidoarjo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan konsistensi dan komitmen dalam mengelola keuangan yaitu Laporan Keuangan (LK) telah tersaji secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 3 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
1.	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo	terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi
2.	Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo	A	BB	*)
3.	Opini atas audit BPK	WTP	WTP	WTP

Sumber data : Bagian Evalap Inspektorat Daerah Desember 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021. Dua indikator mengalami tren yang stabil dan satu indikator mengalami tren yang tidak stabil dari tahun ke tahun.

Maturitas SPIP

Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo tiga tahun terakhir realisasi pada level terdefinisi, ini satu dari dua indikator yang realisasinya kategori stabil, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara konsisten telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan.

Nilai SAKIP Kabupaten

Indikator ini pada tahun 2020 atas penilaian kinerja tahun 2019 mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari target yang dipasang pada tahun 2019, indikator ini capaiannya sebesar 100% artinya realisasi sudah sesuai dengan target yang dipasang.

Opini Audit BPK

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2021 mendapatkan opini atas audit BPK dengan kategori “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas LKPD tahun 2020. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 3 tahun terakhir ini label WTP masih dipercayakan BPK kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jika dikumulatifkan dalam kurun waktu 8 tahun Kabupaten Sidoarjo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, label ini wajib dipertahankan.

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah

Tabel 3.5

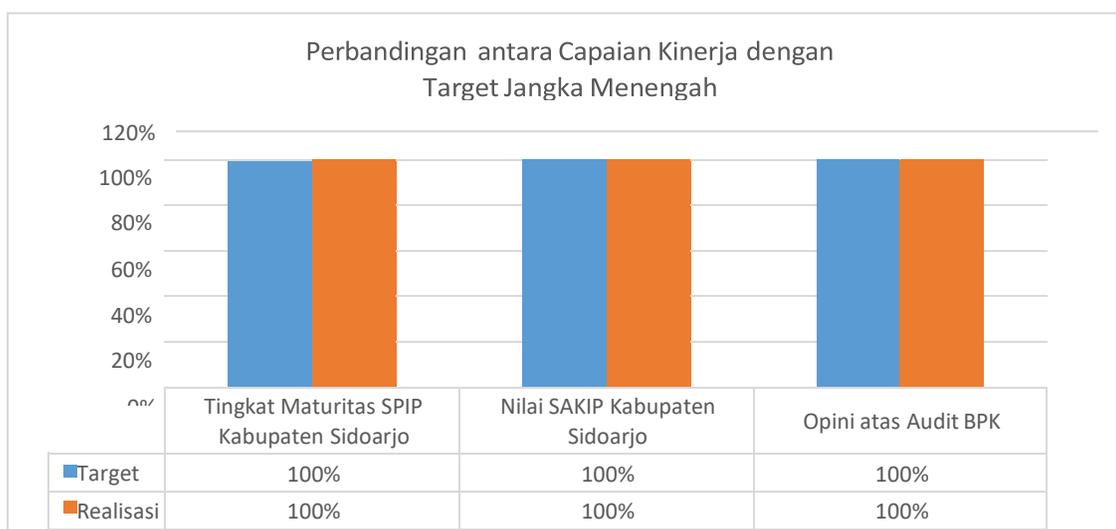
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1.	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo	terdefinisi	terdefinisi	100%
2.	Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo	*)	A	100%
3.	Opini atas audit BPK	WTP	WTP	100%

Sumber data : QA BPKP Provinsi Jatim dan LHP BPK tahun 2021 atas LKPD 2020

Grafik 3.2

Perbandingan antara capaian kinerja tujuan dengan target Jangka Menengah



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator tujuan tahun 2021 jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikategorikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Maturitas SPIP

Berdasarkan *Quality Assurance* (QA) BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : SP-1354/D3/04/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 3,0909 dengan kategori level 3 (terdefinisi). QA tersebut dijadikan acuan realisasi tahun 2021 karena sampai saat ini QA BPKP Pusat belum menerbitkan QA atas maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo. Target terdefinisi yang dipasang pada akhir tahun renstra (2021) telah terpenuhi dengan capaian 100%. Namun nilai maturitas SPIP perlu ditingkatkan lagi secara sistematis.

Nilai SAKIP Kabupaten

Nilai SAKIP atas kinerja pemerintah kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sampai saat ini belum rilis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Opini Atas Audit BPK

Pada indikator ini capaian kinerja sebesar 100% jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu akhir tahun renstra 2016-2021. Hal ini menunjukkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola keuangan.

iv. Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart nasional

Tabel 3.6

Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart nasional

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi Tahun 2021	Target Nasional	Capaian (%)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

v. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis

Tabel 3.7

Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi Tahun 2021	Target Instansi Sejenis	Capaian (%)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

vi. Evaluasi dan Analisis

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan hasil capaian kinerja atas indikator tujuan tahun 2021, maka dapat disajikan tingkat keberhasilan kinerja tujuan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Capaian (%)	Kategori
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik melalui optimalisasi pengendalian internal	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo	100%	Berhasil
		Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo	*)	*)
		Opini atas audit BPK	100%	Berhasil

Ket *) realisasi belum rilis

Dari 2 (dua) indikator yaitu Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo dan indikator Opini atas audit BPK capaian tahun 2021 sebesar 100% dengan kategori **BERHASIL**, sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo belum dapat disajikan karena sampai saat ini nilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum rilis.

c. Pengukuran Kinerja Tahunan

Pengukuran kinerja sasaran tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja sasaran di tahun 2021 dengan target dari indikator kinerja sasaran di tahun 2021, sebagaimana pada Renstra tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-
		Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	100% (48 OPD)	100%
		Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-
		Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi	100%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti	78%	88,76% (221/249 rekom)	113,79%

	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	98%	100% (958/958 rekom)	102,04%
	Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%	100% (92/92 kasus)	100%

Sumber data : Laporan Hasil Pengawasan Desember 2021

d. Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

Tabel 3.10
Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan target sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
1	Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-
2	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	100% (48 OPD)	100%
3	Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-
4	Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi	100%
5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti	78%	88,76% (221/249 rekom)	113,79%
6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	98%	100% (958/958 rekom)	102,04%
7	Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%	100% (92/92 kasus)	100%

Sumber data : Laporan Hasil Pengawasan Desember 2021

Grafik 3.3

Perbandingan antara capaian kinerja sasaran dengan target Jangka Menengah



Dari tabel dan grafik tersebut di atas dapat disampaikan bahwa capaian kinerja rata-rata mencapai 100,83% dari target yang telah ditetapkan.

Indikator Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara dan indikator Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara.

Indikator Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara dan Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara pada tahun ini tidak dilaksanakan dikarenakan pada masa pandemi Covid 19 banyak tugas mandatory yang harus dilaksanakan APIP baik dari Pemerintah Daerah, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat sehingga kegiatan audit/pemeriksaan yang menjadi alat ukur indikator ini dibatasi jumlah samplingnya.

Indikator Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B

Pada indikator persentase perangkat daerah yang nilai SAKIP minimal B dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2020 telah dilakukan upaya peningkatan nilai SAKIP OPD dengan melaksanakan pendampingan secara khusus kepada 8 (delapan) OPD bernilai B pada tahun 2019. Dan upaya tersebut membuahkan hasil terbukti pada tahun 2020 tidak ada OPD yang bernilai B. Pada tahun 2020 upaya asistensi terus dilakukan dan upaya ini juga membuahkan hasil dengan menambah pundi-pundi nilai SAKIP A dari 15 OPD pada tahun 2020 menjadi 16 OPD mendapat nilai A pada tahun 2021.

Indikator Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi

Capaian kinerja pada indikator ini telah mencapai 100%, walaupun penetapan atas maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diusulkan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur belum ditetapkan oleh BPKP Pusat Jakarta, upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan maturitas SPIP terus dilakukan, Pemerintah kabupaten Sidoarjo terus memotivasi agar antusias OPD meningkat dalam memitigasi risiko baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Upaya membangkitkan semangat OPD dalam memitigasi risiko dilakukan dengan jalan asistensi, konsulting, dan monitoring. Pada tahun 2020 upaya tersebut ditingkatkan dengan memasukan nilai SPIP OPD pada penilaian SAKIP, sehingga penilaian SAKIP OPD pada tahun 2020 menggunakan komposisi sebagai berikut :

1. Nilai LKE SAKIP dengan bobot 95%
2. Nilai SPIP (hasil penilaian risiko OPD) dengan bobot 5%

Upaya tersebut berhasil memicu OPD untuk melakukan penilaian risiko dengan tingkat pengumpulan 100% (48 OPD)

Indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti

Berdasarkan data laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal pada tahun 2021, jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal berjumlah 249 rekomendasi, yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 221 rekomendasi dengan persentase 88,76%. Target tahun 2021 yang dipasang pada indikator ini 78% atau 195 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dari jumlah seluruh rekomendasi yang masuk tahun 2021 sebanyak 249 rekomendasi. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung bahwa realisasi kinerja 88,76% dari 78% yang ditargetkan dengan capaian kinerja 113,79% dengan kategori SANGAT BERHASIL.

Indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Eksternal Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti

Berdasarkan data laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2021, jumlah kumulatif rekomendasi hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berjumlah 958 rekomendasi dan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 958 rekomendasi, dengan demikian capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dengan kategori BERHASIL.

Indikator Persentase Kasus/Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (audit investigasi dan riktu) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021, jumlah kasus/pengaduan yang masuk mulai

awal Januari s.d. akhir Desember 2021 sejumlah 92 kasus/pengaduan dengan rincian sumber kasus/pengaduan sebagai berikut :

1. Kasus/pengaduan yang bersumber dari APH	6 kasus
2. Kasus/pengaduan yang bersumber dari masyarakat	59 kasus
3. Kasus kepegawaian	<u>27 kasus</u>
Jumlah	92 kasus

Dari 92 kasus yang masuk selama tahun 2021 yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 92 kasus, dengan demikian realisasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100% berkategori BERHASIL.

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.11
Perbandingan realisasi kinerja sasaran 3 tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
1.	Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara	0,62% (2 desa)	-	-
2.	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100% (48 OPD)	100% (48 OPD)	100% (48 OPD)
3.	Persentase perangkat daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	2,04% (1 OPD)	-	-
4.	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi
5.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	99,88% (844/845 rekom)	100% (930/930 rekom)	100% (958/958 rekom)
6.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	89,82% (600/668 rekom)	75% (123/164 rekom)	88,76% (221/249 rekom)
7.	Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	91,18% (31/34 kasus)	100% (144/144 kasus)	100% (92/92 kasus)

Sumber data : Subag Evalap, Desember 2021

Grafik 3.4

Perbandingan realisasi kinerja sasaran 3 tahun terakhir



Dari tabel dan grafik tersebut di atas dapat disampaikan bahwa dari 7 (tujuh) indikator sasaran terdapat 5 (lima) indikator dengan realisasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan 2 (dua) indikator pada tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut :

Indikator Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara dan indikator Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara.

Indikator Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara pada tahun 2019 realisasi 0,62% atau terdapat 2 (dua) desa dari 322 jumlah desa di kabupaten Sidoarjo bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara. Sedangkan indikator Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara pada tahun 2019 realisasi 2,04% atau terdapat 1 (satu) OPD dari 48 OPD yang ada di kabupaten Sidoarjo. Namun pada tahun 2020 dan 2021 kedua indikator ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tahun 2020 dan 2021 adalah masa pandemi Covid 19 dan banyak tugas mandatory yang harus dilaksanakan APIP baik dari Pemerintah Daerah, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat sehingga kegiatan audit/pemeriksaan yang menjadi alat ukur indikator ini dibatasi jumlah samplingnya.

Indikator Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi

Realisasi dari indikator ini mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan tren positif pada level 3 (terdefinisi), upaya Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan maturitas SPIP terus dilakukan dengan terus memotivasi agar antusias OPD meningkat dalam memitigasi risiko baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Upaya membangkitkan semangat OPD dalam memitigasi risiko

dilakukan dengan jalan asistensi, konsulting, dan monitoring.

Indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti

Tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan. Dari data tersebut di atas TLHP atas pemeriksaan Intern/Inspektorat menunjukkan tren positif (menunjukkan kenaikan jumlah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan) mulai tahun 2019 sampai 2021, ini menunjukkan konsistensi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam pengawasan internal.

Indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Eksternal Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti

Dari data dan grafik di atas upaya menindaklanjuti atas TLHP BPK RI dari tahun 2019 sampai dengan 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan, ini menunjukkan konsistensi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam dalam menjalin kerja sama dengan pengawasan eksternal (BPK).

Indikator Persentase Kasus/Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Keseriusan dalam menindaklanjuti kasus/pengaduan yang masuk telah ditunjukkan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, hal ini dapat dilihat pada data di atas 3 tahun terakhir realisasi 100%, tahun 2019 realisasi 91,18% dari jumlah 34 kasus/pengaduan masuk ke Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 31 kasus/pengaduan, 2 kasus/pengaduan belum dapat ditindaklanjuti, hal ini disebabkan kasus/pengaduan masuk pada akhir bulan Desember 2019 sehingga proses tindak lanjut dilakukan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 realisasi 100% dari 144 kasus/pengaduan yang masuk sudah ditindaklanjuti seluruhnya. Dan pada tahun 2021 realisasi 100% dari dari 92 kasus/pengaduan yang masuk sudah ditindaklanjuti seluruhnya.

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah

Tabel 3.12
Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
1	Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-

2	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100% (48 OPD)	100%	100%
3	Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-
4	Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi	100%
5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti	88,76% (221/249 rekom)	78%	113,79%
6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100% (958/958 rekom)	98%	102,04%
7	Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100% (92/92 kasus)	100%	100%

Sumber data : Laporan Hasil Pengawasan Desember 2021

Berdasarkan tabel di atas dan reviu Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021, dapat disampaikan bahwa realisasi masing-masing indikator sasaran jika dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir tahun renstra 2016-2021) terealisasi sesuai dengan target, bahkan ada 2 (dua) indikator yaitu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti dan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti capaian melebihi 100%.

iv. Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart nasional

Tabel 3.13

Perbandingan antara capaian kinerja sasaran dengan standart nasional

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Target Nasional	Capaian (%)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

v. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis

Tabel 3.14

Perbandingan antara capaian kinerja sasaran dengan instansi sejenis

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Realisasi instansi sejenis	Capaian (%)
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

vi. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Tabel 3.15
Analisis Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-
		Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	Berhasil
		Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-
		Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	100%	Berhasil
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti	113,79%	Sangat Berhasil
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	102,04%	Sangat Berhasil
		Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%	Berhasil

Sumber data : Laporan Hasil Pengawasan Desember 2021

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator dengan capaian 100% kategori **berhasil** dan 2 (dua) indikator dengan capaian di atas 100% berkategori **sangat berhasil**. Jadi dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 adalah 100,83% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**.

3.3. Analisis Pencapaian Program Pendukung

“Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” untuk mewujudkan sasaran strategis ini, pada tahun 2021 didukung dengan 2 program dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.16
Capaian kinerja Program Tahun 2021

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
		Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian	-	-	-	-

1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	keuangan Negara				
		Persentase perangkat daerah yang nilai SAKIP B	100%	100% (48 OPD)	100%	100% (Berhasil)
		Persentase perangkat daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara	-	-	-	-
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	78%	88,76% (221/249 rekom)	113,79%	113,79% (Sangat Berhasil)
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	98%	100% (958/958 rekom)	102,04%	102,04% (Sangat Berhasil)
		Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%	100% (92/92 kasus)	100%	100% (Berhasil)
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo	Terdefinisi	Terdefinisi	100%	100% (Berhasil)
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	79,02 %	103,97 %	103,97% (Sangat Berhasil)

Sumber data : Laporan Hasil Pengawasan Desember 2021

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa capaian kinerja 2 (dua) program pendukung sasaran strategis jika dirata-rata sebesar 100,83% dengan kategori **Sangat Berhasil**. Ini menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan mendukung ketercapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

3.4. Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.172.416.465	14.653.638.275	96,58
Program Penyelenggaraan Pengawasan	302.182.425	267.633.800	88,57

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	419.439.500	391.619.500	93,37
Total	15.894.038.390	15.312.891.575	96,34

Sumber data : LRA Inspektorat Daerah Kab. Sidoarjo per 31 Desember 2021

3.5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.18
Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-	15.894.038.390	15.312.891.575	96,34%
	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	100% (48 OPD)	100%			
	Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-			
	Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi	100%			
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti	78%	88,76% (221/249 rekom)	113,79%			
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	98%	100% (958/958 rekom)	102,04%			
	Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%	100% (92/92 kasus)	100%			

3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Efektivitas dan Efisiensi

Tabel 3.19
Efektivitas dan Efisiensi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara			

aan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100,83%	96,34%	3,66
	Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara			
	Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi			
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti			
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti			
	Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti			

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi sebesar 3,66 efisiensi tersebut disebabkan oleh :

- a. Riil kebutuhan
- b. Sebagian paket pengiriman dilakukan oleh petugas caraka
- c. Masih dalam masa pandemi Covid 19 sebagian kegiatan dialihkan dengan sistem daring
- d. Negosiasi saat evaluasi pada belanja jasa konsultasi pemeliharaan gedung kantor

BAB IV

PENUTUP / SIMPULAN UMUM

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2021 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo rata-rata 100,83% dengan kategori **sangat berhasil**. Sebagai upaya perbaikan agar tahun berikutnya indikator sasaran dapat meningkatkan secara kualitatif dan kuantitatif, maka upaya yang akan dilakukan adalah :

- a. Mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan, asistensi, monitoring, evaluasi dan pengawasan lainnya pada perangkat daerah dan desa.
- b. Peningkatan kompetensi auditor agar lebih smart dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Melakukan evaluasi secara berkala agar hambatan-hambatan yang timbul segera dapat diselesaikan.

**LAMPIRAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH
PADA TAHUN 2021**

**PENGHARGAAN KE-1
IMPLEMENTASI SAKIP TERBAIK KEEMPAT**



PENGHARGAAN KE-2

PERINGKAT KEDUA ATAS INTEGRITAS DAN KOMITMEN DALAM KEPATUHAN PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

